

KONFLIK ANTARWARGA DESA: Analisis Simon Fisher Melalui Studi

Kasus

Benjamin¹, Ikram², Susetyo³, Yuni Ratnasari⁴

¹⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

²⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

³⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

⁴⁾Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

ABSTRAK

Latar belakang penulisan ini dari beberapa kejadian konflik di Kabupaten Lampung Selatan dimana penyebab konfliknya, yaitu adanya perseteruan antar siswa SMA, seorang pelajar SMP ditusuk di tempat organ tunggal, memperebutkan lahan parkir di pasar dan pelecehan sexual. Tujuan penulisan ini hendak mendeskripsikan dan menjelaskan tahapan konflik yang terjadi antar pihak-pihak yang berkonflik. Penulis menggunakan perspektif teoritis Simon Fisher tentang tahapan konflik, dan teori Johan Galtung tentang segitiga konflik sebagai landasan teoritis terkait proses tahap krisis, dimana sikap dipersepsikan oleh pihak-pihak berkonflik tentang isu pelecehan seksual. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya studi kasus di mana informan-informan ditentukan dengan purposive teknik sampling yang meliputi tokoh formal, tokoh informal dan anggota masyarakat dari kedua belah pihak yang berkonflik. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi. Kesimpulan, bahwa konflik kekerasan sebagai insiden konflik yang tergolong besar terjadi antar warga dan antar desa di wilayah perdesaan yang hidup bertetangga antara warga Desa Agom Kecamatan Kalianda dengan warga Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, dimana pihak warga Desa Agom dengan massa pendukungnya yang merasa sebatin, spontanitas berusaha menyerang dan menghancurkan pihak warga Desa Balinuraga dan digambarkan berdasarkan skala waktu, urutan kejadian konflik dan pemetaan konflik, serta adanya upaya penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak yang berkonflik maupun oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas dengan melalui: membangkitkan kepercayaan bagi para warga kedua belah pihak yang berkonflik, memfasilitasi dialog oleh pemerintah daerah, negosiasi, mediasi dan arbitrase, ada deklarasi perdamaian pada tahap akibat serta pada tahap pascakonflik dilaksanakan sosialisasi maklumat perjanjian perdamaian.

Kata kunci : konflik antar warga, Tahapan Konflik dan resolusi konflik antar warga

ABSTRACT

The background of this writing of some of the events of conflict in South Lampung regency where the cause of the conflict, partly because of a fight between a high school student, a junior high school student was stabbed in a single organ, fight over parking space in the market and sexual harassment. The purpose of writing is about to describe and explain the stages of the conflict between the parties in conflict. The author uses a theoretical perspective Simon Fisher of the stages of the conflict, and Johan Galtung about the triangle theory as the theoretical foundation of conflict-related crisis stage process, in which the attitude is perceived by the parties to the conflict on the issue of sexual harassment. The authors used a qualitative approach, especially in the case studies where informants were determined by purposive sampling techniques which include formal leaders, informal leaders and community members from both sides of the conflict. Information was collected through interviews, observation, documentation. Conclusion, that violent conflict as a conflict incidents were classified occur between people and between villages in rural areas the coexistence between villagers Agom

District of Trump with villagers Balinuraga District of Way Panji South Lampung regency, where the villagers Agom with a mass of supporters who feel sebatin, spontaneity tried to attack and destroy the villagers Balinurga and is described by the time scale, the sequence of events conflicts and conflict mapping, as well as the efforts to settle the conflict by both sides in the conflict as well as by third parties that have the authority through: generate trust for the citizens of both sides of the conflict, facilitate dialogue by local governments, negotiation, mediation and arbitration, there is a declaration of peace on the stage and at the stage of post-conflict due to socialization intimation implemented peace agreement.

Keywords: Conflict between villagers, Stages of conflict and resolution of conflicts among villagers.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki rakyat yang plural baik dari segi etnis, kepercayaan, kebudayaan, bahasa dan lain sebagainya. Keadaan tersebut tak urung membuat suatu perbedaan cara pandang dan pemahaman sehingga menimbulkan konflik. Konflik tersebut bukan hanya menyangkut individu dari kelompok yang berbeda, namun sangat berpotensi kearah yang lebih luas, yaitu konflik horizontal antar ras, kepercayaan, etnis dan lain sebagainya (Wirawan, 2010:7-12). Konflik-konflik yang sering timbul antar kelompok yang berbeda, sering terjadi karena perbedaan ekonomi. Perbedaan ini menyebabkan kecemburuan social di kelompok yang lain terhadap kelompok tertentu, sehingga menimbulkan konflik yang menjurus kearah kekerasan. Apalagi setiap konflik tidak cepat diatasi oleh pemerintah, maka konflik yang berbau agama maupun suku akan cepat meluas (Burhanudin, dkk,1998:28). Bahkan, konflik tersebut dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Hal ini tergantung dari skala dan jenis konflik yang terjadi di masyarakat (Susan, 2010).

Dalam beberapa tahun terakhir, yaitu antara tahun 2005-2012, konflik yang terjadi di Indonesia lebih kurang sebanyak 22 kasus. Konflik tersebut seperti konflik kerusuhan di bekasi, tawuran antara warga Pasar Rumpit dengan warga Menteng Tenggulun, tawuran antar warga menggunakan petasan dan bom Molotov di Jakarta, dan lain sebagainya. Konflik tersebut tentu memakan korban jiwa. Bahkan konflik tersebut tak urung membuat masyarakat harus mengungsi dari tempat tinggal mereka, karena takut akan terkena konflik tersebut. Kasus seperti ini dapat dilihat pada konflik yang terjadi di Provinsi Lampung. Konflik

tersbut memakan korban jiwa, terjadinya pembakaran rumah yang menyebabkan kerusakan yang parah, bahkan menyebabkan trauma bagi korban-korban yang tidak berdosa. Konflik yang terjadi di Provinsi Lampung tersebut tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan dengan eskalasi konflik terjadi sampai empat kali dalam empat tahun, yaitu dari 2008-2012.

konflik yang terjadi di Kabupaten tersebut merupakan konflik yang dilatarbelakangi oleh dendam karena ada perseteruan yang terjadi sebelumnya yang masih menyisakan kekecewaan akibat penyelesaian masalah yang tidak tuntas. selain itu, motif kekerasan juga karena motif ekonomi, dimana ada persaingan perebutan lahan ekonomi atau sumber pendapatan, sehingga memunculkan suatu kecemburuan sosial dan kekecewaan akibat merasa tidak adilnya pembagian ekonomi masyarakat (Wirawan, 2010; Sihbudi, 2001; Faturochman dan Nuraeni, 2006; dan Umar 2011). salah satu konflik lain, bahkan terjadi akibat hal sepele, yaitu adanya perkelahian antar pelajar yang disebabkan karena adanya hiburan tradisional (Joget), serta adanya penarikan uang parkir yang tidak seberapa. di samping itu juga memang ada penyebab fatal, yaitu adanya pelecehan seksual (Kesbangpol Kalianda, 2018).

Dengan melihat kejadian-kejadian konflik yang terjadi, terutama konflik yang terjadi di kabupaten lampung selatan sangat menarik untuk dikaji, terutama dalam sudut pandang studi kasus dengan menggunakan analisis Simon Fisher. Hal ini menarik karena konflik yang terjadi di kabupaten tersebut merupakan konflik antar warga desa yang memiliki kepercayaan dan sudut pandang yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Selain itu, konflik tersebut terjadi antara etnis pendatang dengan etnis asli yang pada dasarnya memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dikaji, terutama dari sudut pandang analisis Simon Fisher. di samping itu, penelitian terdahulu mengenai konflik yang dilakukan oleh Umar (2011), Nulhaqim (2007), Yara (2002), Fanani (2001) belum pernah melihat konflik antar desa dengan analisis Simon Fisher, yaitu analisis dengan pendekatan tahapan dari konflik di mana terdapat urutan kejadian konflik itu sendiri (Fisher, 2001). Selanjutnya pada Tahap Konfrontasi, penulis analisis berdasarkan sikap, perilaku dan kontradiksi dari Segitiga Konflik (SPK) Johan Galtung (2003). Penyelesaian konflik, diantaranya melalui : fasilitas dialog,

negosiasi, mediasi dan arbitrase pada Tahap Akibat dan pada Tahap Pasca konflik dilakukan sosialisasi membangun perdamaian. Oleh karena itu, dengan melihat hal tersebut, penelitian ini menarik dikaji karena memiliki tempat tersendiri dalam kajian konflik.

Beberapa kejadian konflik antar warga yang pernah terjadi di Lampung Selatan sebelum tahun 2008, dimana latar belakang penyebab konfliknya, seperti perbedaan agama, pemekaran wilayah desa dan perkelahian antar pemuda/siswa. Kejadian-kejadian konflik sebagai bentuk konflik antar warga yang termasuk dalam kategori jenis konflik horizontal. Menurut Wirawan (2010:97), bahwa konflik antar warga termasuk jenis konflik horizontal yang sering terjadi di desa-desa Indonesia yang berawal dari perkelahian seorang warga dengan seorang warga lainnya dengan penyebab konflik, seperti persaingan perebutan wanita, tersenggol pada saat joget dangdut organ tunggal di pesta pernikahan.

Selanjutnya beberapa insiden konflik antar warga tergolong besar yang muncul di Lampung Selatan setelah tahun 2008, diantaranya yaitu: a. Konflik antar warga Desa Bali Agung, Kecamatan Palas, dengan warga Desa Palas Pasemah pada Desember 2009 dipicu perkelahian antara siswa, b. Konflik antar warga Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, dengan warga Dusun Sukajaya, Desa Margocatur, Kecamatan Kalianda pada November 2011. Amuk massa warga Desa Sidomakmur menuntut atas kematian pelajar yang ditusuk dekat arena organ tunggal, c. Konflik antara warga Dusun Napal dengan warga Desa Kotadalam Januari 2012, d. Konflik antar warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda dengan warga Desa Balinuraga, Kecamatan WayPanji, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung Oktober 2012 (Polres Lampung Selatan dan Lampung Post, Rabu 25 Januari 2012, No. 12330, Tahun XXXVII).

Kejadian-kejadian konflik tersebut di lokasi yang berbeda, namun masih di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah dalam menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang terjadi selalu dengan pendekatan keamanan atau militer. Pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak yang berkonflik acapkali diabaikan (Hendrajaya dkk.,2010). Lain halnya dengan apa yang dinyatakan Hartoyo (dalam Budiman, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung, 2012: 46), bahwa kenyataannya penyelesaian konflik dengan mediasi

masih dibutuhkan oleh mereka yang berkonflik, karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosiokulturalnya. Fenomena ini dipandang karena ada indikasi lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum.

Padahal di dalam menangani konflik untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan, diantaranya: 1) Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan profesional guna menghindari korban di kalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum, 2) Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM. Maka dari itu, walaupun telah dilakukan resolusi konflik tetap saja masih terulang kembali kejadian-kejadian konflik, khususnya Lampung Selatan karena penyelesaian konflik horizontal dapat dikatakan belum terselesaikan melalui pendekatan hukum.

Penulis tertarik mendeskripsikan konflik antar warga antar desa dan antar wilayah di Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, didasarkan: a). Kasus insiden konflik kekerasan Balinuraga termasuk salah satu kategori besar di Indonesia - setelah Kasus konflik Sambas Kalimantan Barat dan Kasus konflik Poso dan Kasus Konflik Maluku ⁵⁾, b). Adanya indikasi pengelolaan konflik konstruktif masih lemah dalam penyelesaian konflik (alternative dispute resolution/ADR) dimana melalui mediasi masih dibutuhkan, dan terabaikannya penyelesaian konflik melalui jalur hukum, c). Rentetan insiden konflik yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan karena kurangnya upaya penanganan yang komprehensif dimana penyelesaian konflik yang dilakukan hanya bersifat elitis dan tidak pernah menyentuh akar rumput permasalahan yang sebenarnya. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah tahapan kejadian konflik antar warga Desa Agom Kecamatan Kalianda dengan warga Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji dan penyelesaian konfliknya ? Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tahapan konflik dan mengkaji penyelesaian konflik.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berdasarkan Studi Kasus (Creswell, 2012:20). Pengumpulan data dengan teknik purposive. Informan-informan ditentukan melalui teknik purposive, mereka yang mengetahui, terlibat dalam konflik dan atau yang menguasai informasi berhubungan dengan topik dan masalah penelitian tersebut. Beberapa informan yang dipilih, yaitu: a. Para tokoh informal dari pihak-pihak yang berkonflik, seperti tokoh agama (kyai/ustadz), tokoh desa/masyarakat, tokoh pemuda dan guru, b. Warga dari desa-desa yang berkonflik yang mempunyai kedudukan struktural, seperti Kepala Desa, dan Perangkat Desa, c. Perwakilan dari pihak-pihak yang berkonflik dari desa tersebut, d. Aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan. Informasi dikumpulkan melalui, yaitu: a. wawancara mendalam (indepth interview), b. observasi, c. studi dokumenter. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses *reduction dan interpretations*. Data ditulis dalam bentuk transkripsi, lalu dilakukan pengkategorian dengan melakukan reduksi data dan dilakukan interpretasi yang mengarah pada tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan konflik antar warga ini, peneliti lebih cenderung menerapkan tahapan konflik dari Fisher daripada tahap-tahap resolusi konflik dari Galtung. Adapun yang dimaksudkan dengan tahapan konflik antar warga dimana menunjukkan peningkatan kejadian konflik ataupun penurunan intensitas suatu kejadian konflik digambarkan dalam skala waktu tertentu yang meliputi diantaranya, yaitu: 1. Tahap Prakonflik, 2. Tahap Konfrontasi, 3. Tahap Krisis, 4. Tahap Akibat dan 5. Tahap Pascakonflik (Fisher: 2001).

Dalam teori tahapan konflik ini, Fisher menjelaskan bahwa dapat terjadi peningkatan suatu kejadian konflik ataupun penurunan intensitas suatu kejadian konflik yang digambarkan berdasarkan skala waktu tertentu pada setiap tahapnya. Namun penulis tidak memperoleh kejelasan secara tegas interval waktu keberlangsungan kejadian konflik dari tahap ke tahap berikutnya. Maka dari itu, di sini penulis berusaha memperjelas dengan memaparkan tahapan konflik Fisher untuk menganalisis kejadian konflik antar warga antar desa di wilayah perdesaan Kabupaten Lampung Selatan yang penulis gambarkan

berlangsung dalam bentuk kurva linier dan pada setiap tahapnya dapat terjadi penyelesaian konflik secara damai. Di dalam teori tahapan konflik Fisher, penyelesaian konflik terjadi pada tahap akibat, lihat gambar 1.

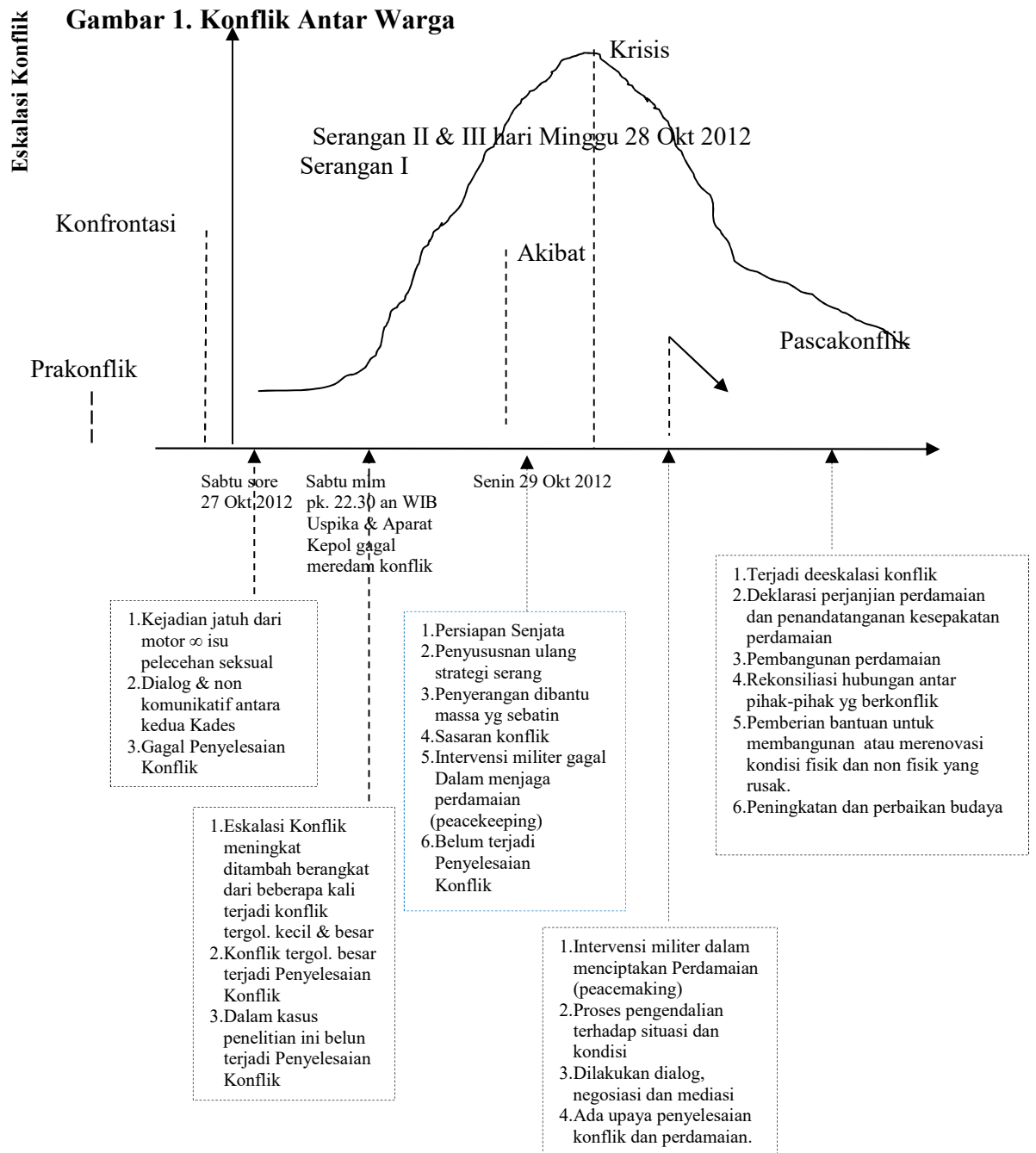
Tahap Prakonflik.

Pada tahap prakonflik terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, walaupun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi, mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara kedua belah pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

Awal kejadian konflik tanggal 27 Oktober 2012, dimana sebagai pemicu konflik adalah isu pelecehan seksual yang menimpa dua gadis pengendara motor warga Desa Agom yang dilakukan oleh pemuda-pemuda warga Desa Balinuraga. Sekelompok Warga Desa Agom kemudian menemui kepala desa Balinuraga untuk meminta pertanggung-jawaban terhadap kasus tersebut, terjadilah dialog panjang dan ramai serta negosiasi tidak ada kesepakatan dan kesepahaman. Menurut peneliti kalaulah pada waktu itu terjadi dialog yang intensif antar pihak-pihak yang berkonflik, tentunya dapat meredam potensi konflik. Hal mana sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik pasal 9 Bagian Keempat Meredam Potensi Konflik, sehubungan dengan mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat.

Dalam kasus konflik antar warga di Balinuraga tersebut, seperti yang dijelaskan Jamil (2007) bahwa konflik dapat dipandang sebagai masalah dan konflik dapat menjadi kekerasan dimana adanya saluran yang tidak tepat untuk melakukan dialog dan ketidaksepakatan, apalagi ditambah dengan suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan yang ada tidak didengar atau dibahas. Apalagi menurut penulis bahwa proses dialog dan negosiasi berlangsung terbuka dan dilihat oleh warga masyarakat Balinuraga. Disini Jamil mempertegas bahwa negosiasi bukan berarti harus mengalah dan juga bukan berarti harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Kemampuan bernegosiasi adalah sebagai bentuk suatu keterampilan yang dapat dipelajari dengan sikap positif adanya kesadaran dan kesediaan untuk berusaha mencari penyelesaian konflik (2007). Proses dialog dan negosiasi berlangsung terbuka dan diketahui oleh warga Balinuraga.

Akhirnya, Kades Agom dan beberapa wakil warga Agom melaporkan kejadian yang menimpa ke kepolisian dan menindaklanjuti dengan mencari pelaku pelecehan seksual. Namun, tidak ditemukan dan selanjutnya melaporkan ke ketua adat dari beberapa marga Lampung, Lampung Selatan.



Tahap Konfrontasi

Pada tahap konfrontasi konflik menjadi semakin terbuka, dimana satu pihak merasa ada masalah, dan mungkin para pendukungnya mulai melakukan

aksi perlawanan atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian dengan kekerasan pada tingkat rendah terjadi diantara kedua pihak yang berkonflik. Masing-masing pihak saling mengumpulkan daya kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi. Hubungan diantara kedua pihak yang berkonflik menegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung di masing-masing pihak.

Seiring sejalan dengan perilaku konfrontasi, sebenarnya terjadinya tragedi konflik Balinuraga berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai pernyataan sikap warga masyarakat Lampung Selatan, diantaranya yaitu :

1. Pada tahun 1982 akibat perselisihan pemuda Desa Sandaran dan Desa Balinuraga, dimana warga Balinuraga menyerang dengan membakar 2 rumah warga Desa Sandaran.
2. Pada tahun 2005 masyarakat Bali Agung Kecamatan Palas membakar beberapa rumah penduduk Desa Palas Pasemah.
3. Tahun 2009 masyarakat Bali di Kecamatan Ketapang menyerang dan melempari masjid di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang.
4. Pada tahun 2010 masyarakat Bali Agung menyerang Desa Palas Pasemah dengan melakukan pembakaran beberapa rumah penduduk dan korban meninggal satu orang warga Palas Pasemah.
5. Tahun 2010 masyarakat Bali dari Kecamatan Ketapang menyerang Desa Tetaan Kecamatan Penengahan dan menghancurkan gardu ronda dan pangkalan ojek di perempatan Gayam Kecamatan Penengahan.
6. Akhir tahun 2011 masyarakat Bali menyerang Desa Marga Catur dengan melakukan pembakaran belasan rumah warga Lampung dan pada saat melakukan penyerangan masyarakat Bali memakai simbol-simbol khusus adat istiadat Bali.
7. Bulan Januari 2012 masyarakat Bali melakukan tindakan premanisme terhadap pemuda dari Desa Kotadalam, lalu masyarakat Dusun Napal melakukan penyerangan terhadap Desa Kotadalam Kecamatan Sidomulyo yang menyebabkan beberapa orang warga Kotadalam mengalami luka-luka, dan beberapa rumah warga rusak serta berakibat rumah-rumah warga Dusun

Napal Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo dibakar oleh warga Desa Kotadalam.

8. Pada saat malam takbiran Idul Fitri tahun 2012, para pemuda Desa Balinuraga melakukan keruhan dan keonaran di depan masjid Sidoharjo Way Panji di mana saat itu umat muslim sedang melakukan takbiran di masjid.
9. Belum lagi yang termasuk insiden-insiden kecil lainnya pada setiap hajatan yang dilakukan oleh warga Jawa, Palembang maupu warga Lampung, di mana para pemuda Bali selalu melakukan kerusuhan secara berkelompok.

Pada tahap konfrontasi ini dibalik kejadian jatuhnya korban dari motor sampai dengan pecahnya konflik, bila ditelusuri secara historis urutan kejadian dengan indikasi eskalasi konflik ditandai oleh beberapa indikator diantaranya, yaitu: a. Peningkatan insiden-insiden konflik dengan kekerasan tergolong kecil dan besar, b. Beberapa kali terjadi insiden-insiden konflik public, c. Adanya sekelompok warga tertentu yang tidak membaaur dengan kelompok warga lainnya, sehingga terlihat kurang berkomunikasi dan pemukiman yang eksklusif terkucil (*enclave*), d. Dengan beberapa kali kejadian konflik, ekspresi keluhan warga masyarakat tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah, e. Kurangnya kepercayaan terhadap struktur yang mendukung keamanan dan keadilan, sehingga apabila terjadi insiden main hakim sendiri, f. Ketimpangan pembangunan infrastruktur (infrastruktur yang lebih baik di lokasi pendatang/transmigrasi).

Peningkatan insiden-insiden kekerasan dimana konflik dengan kekerasan tergolong kecil, dan peningkatan insiden-insiden kekerasan dimana konflik dengan kekerasan tergolong besar, yaitu tahun 2011 Konflik Marga Catur, tahun 2012 Konflik Napal, dan Konflik Balinuraga. Selanjutnya terdapat beberapa kali terjadinya insiden konflik public, yaitu: a. di Pasar Senen Desa Palas Pasemah insiden pertengkaran antar siswa warga Bali Desa Bali Agung dengan siswa warga Desa Palas Pasemah tahun 2009, b. di depan Masjid di Desa Ruguk 2009 warga Bali Kecamatan Ketapang berbuat keonaran, c. di Pasar Sidomulyo, Lampung Selatan tahun 2012 dimana pengendara sepeda motor warga Lampung tidak terima ditagih biaya parkir oleh tukang parkir warga Bali Napal.

Adapun tentang sumber-sumber penyebab konfliknya dapat diindikasikan memiliki sebab-sebab tertentu disertai dengan masalah komunikasi antara pihak-

pihak yang berkonflik mengarah pada konflik terbuka, dapat dianalisis berdasarkan kerangka Wijardjo (2001) tentang Konflik Kepentingan dan Konflik Hubungan Antar Manusia. Konflik kepentingan yang terjadi karena masalah permintaan ganti rugi uang sebesar Lima Juta Rupiah ke pihak orang tua pelaku jatuhnya korban tidak ada kesepakatan dan keputusan oleh Kades Balinuraga. Adapun konflik hubungan antar manusia terjadi karena meningkatnya emosi negative pada pihak Kades Balinuraga setelah mendengar ocehan warganya yang mengatakan gak usahlah diurus orang Desa Agom aja dan semakin membuat kesal warga Agom yang mewakili orang tua korban.

Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan dan mewujudkan konflik destruktif (Wirawan), karena komunikasi yang tidak baik pada saat dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik diwakili oleh Kades Balinuraga dengan Kades Agom, beragamnya karakteristik sistim sosial, seperti suku, agama yang disertai dengan pola hidup yang eksklusif (enclave) bagi warga Bali, dimana warganya berkepribadian yang selalu curiga dan berpikiran negatif kepada pihak lain, egois, sombong, merasa paling benar, serta kurang dapat mengendalikan emosi dan maunya menang sendiri.

Sehubungan dengan Teori Hubungan Masyarakat (Fisher), dimana konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus-menerus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan antara kedua belah pihak yang berkonflik antara warga Desa Agom sebagai penduduk asli dengan warga Desa Balinuraga sebagai pendatang yang lebih maju dan berhasil. Adapun

sasaran yang dicapai pascakonflik, diantaranya: a. Meningkatnya komunikasi dan saling pengertian antara pihak-pihak yang berkonflik, diantara mereka sebagai elit desa saling mengundang dalam acara-acara tertentu, dan b. Terwujudnya toleransi yang saling menerima keragaman budaya.

Urutan kejadian ini merupakan daftar waktu dari tahun, bulan atau hari sesuai dengan skalanya yang digambarkan sesuai dengan kejadian-kejadian secara kronologis. Dengan demikian, dengan metode penggunaan urutan kejadian dapat menunjukkan sejarah suatu konflik antar warga yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, seperti digambarkan pada gambar 2.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka analisis peneliti bahwa kejadian dari Tahap Prakonflik yang mulai terjadi pada hari Sabtu dan malam harinya ada usaha dialog antara kedua kades dan orang tua pelaku pelecehan. Namun yang terjadi nonkomunikatif yang dilakukan oleh Kades Balinuraga, maka tidaklah terjadi peredaman konflik dan sebaliknya terjadi eskalasi konflik, di mana terjadi dua kali penyerangan hari Sabtu malam dan hari Minggu yang selalu kalah strategi. Akhirnya hari Senin terjadi serangan besar-besaran pada Tahap Krisis. Artinya, Tahap Konfrontasi seolah-olah hanya sebagai tumpuan endapan emosial yang siap meledak untuk melangkah langsung ke Tahap Krisis tanpa fase yang lama, namun melalui penantian yang cukup panjang dengan berbagai insiden konflik.

Tahap Krisis

Tahap krisis merupakan puncak konflik, dimana terjadi ketegangan dan atau kekerasan yang paling hebat. Dalam konflik skala besar, merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal di antar kedua belah pihak yang berkonflik kemungkinan putus. Awal mula konflik Balinuraga terjadi, seperti diutarakan informan H, bahwa

“mendengar peristiwa tersebut warga Lampung mewakili orang tua korban datang bersama-sama ke Desa Balinuraga minta pertanggungjawaban kepada keluarga pelaku dan hari Sabtu malam mencari pelaku. Mereka disambut dengan ratusan warga Balinuraga siap persenjataan, seperti senapan angin dan senjata tajam menyerang warga Lampung Agom. Akibatnya warga Lampung ada 2 (dua) orang yang terluka dan 1 (satu) unit sepeda motor dibakar.”

Hari Sabtu malam tanggal 27 Oktober 2012, penyerangan dilakukan oleh sekelompok massa warga Desa Agom. Mereka berkumpul di Pasar Patok Sidorejo dan menyerang ke pemukiman warga Bali di Desa Balinuraga Kec. Way Panji, akibatnya sebuah kios obat-obat pertanian dan toko kelontongan terbakar milik MS. Keesokan hari minggu beberapa warga Desa Agom kembali menyerang Desa Balinuraga yang kedua kalinya, dimana disambut dengan tembakan senjata api yang mengakibatkan satu orang tewas tertembak di bagian kepala dan langsung dimutilasi oleh warga Desa Balinuraga.

Dengan kejadian tersebut, akhirnya beberapa warga Desa Agom mundur dan balik pulang. Hari Minggu malam Senin melalui pesan singkat (sms) - intinya:

“Ass... Tabik pun kaban wagei sikam Buay Raden Intan & Raden Imbo. Mohon bantuan kaban wagei sunyini, sikam d Kalianda d serang jelma kurang kekuatan jelma gam tewas 9, jadi mohon bantuan segera. Sebarkan bbm sinji. Trims Bela Sai Bumi Ruwai Jurai. Lampung Bersatu”. Artinya: “Ass... salam untuk warga kami Buay Raden Intan dan Raden Imbo. Mohon bantuan saudara semuanya, kami di Kalianda diserang, kita kurang kekuatan, orang kita tewas 9, jadi mohon bantuan segera. Sebarkan bbm ini. Terimakasih membela Sai Bumi Ruwai Jurai. Lampung Bersatu”.

Berdasarkan informasi tersebut masing-masing desa menyerukan melalui masjidnya akan turut mendukung menyerang warga Desa Balinuraga, dan warga Desa Agom mempersiapkan senjata-senjata untuk dipakai penyerangan, seperti yang diuraikan MS. Hari Senin nya 29 Oktober 2012 sejumlah warga Lampung (termasuk warga Agom) dengan kekuatan massa sekitar 20.000 orang dari berbagai daerah Provinsi Lampung di pagi hari berkumpul untuk melakukan penyerangan ke warga Desa Balinuraga. Rencana penyerangan dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Namun atas pertimbangan Tokoh Adat dari Keratuan Darah Putih yang dipimpin oleh Raden Imba dan Lima Marga Lampung Selatan, penyerangan dilakukan pada pukul 14.00 hingga 16.30 WIB dimana selesai tidak selesai warga Lampung harus meninggalkan Desa Balinuraga. Pada serangan kali ini mengakibatkan warga Desa Balinuraga banyak yang meninggal dunia, mengungsi, bangunan dirusak dan dibakar, serta kerugian harta benda. Selanjutnya, pihak-pihak yang berkonflik diselesaikan melalui perundingan panjang yang melibatkan, antara lain: tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polri dan TNI (Sumber : Tokoh Adat Desa Agom).

Penerapan teori segitiga konflik Galtung dalam menganalisis konflik, dimana peneliti berusaha analisis hubungan sebab akibat, sehingga terjadi konflik sosial. Dalam teori segitiga konflik Galtung terdapat 3 dimensi, yaitu sikap, perilaku dan kontradiksi. Dimensi sikap merupakan persepsi dari masing-masing pihak yang berkonflik tentang isu pelecehan seksual terhadap dua gadis warga Desa Agom yang terjatuh dari motor karena ulah pemuda-pemuda warga Desa Balinuraga. Sampai melapor ke kepolisian dan pelaku jatuhnya korban dicari

tidak ketemu, kemudian melapor ke Ketua Adat Lampung Selatan. Berkembanglah eskalasi konflik, sikap dengan persepsi dipicu oleh pesan singkat dan jejaring sosial tentang isu tersebut, sehingga terjadi gerakan massa yang turut menyerang warga Desa Balinuraga. Dalam dimensi perilaku sebagai wujud sebuah bentuk permusuhan dimanifestasikan dalam tindakan nyata penyerangan, pembakaran rumah-rumah, merusak fasilitas umum maupun penjarahan. Dimensi kontradiksi munculnya situasi pada proses konflik yang melibatkan unsur sikap dan perilaku. Kontradiksi terwujud karena adanya unsur persepsi dan tindakan nyata dari masing-masing pihak dengan tindakan aksi konflik kekerasan bersifat destruktif brutal, sadis dan anarkhis.

Pada saat berdialog di rumah orang tua pelaku, di luar rumah ramai dikerumuni oleh warga Desa Balinuraga sambil mengoceh “udah lah tausah diurusin. Desa Agom aja kecil”. Akibatnya, Kades Balinuraga terpancing dan mengatakan “ya sudahlah kalau tidak mau diurusin”. Apalagi perbedaan pendapat dan sikap ditunjukkan dengan tidak adanya hasil keputusan dari dialog dan pencarian pelaku jatuhnya korban oleh pihak polisi tidak ditemukan, sehingga semakin memicu terjadinya konflik dengan sikap melaporkan ke ketua adat dari Marga Lampung Lampung Selatan serta pesan singkat (SMS) dan jejaring sosial. Pada saat agresi, ribuan massa serentak mengucap Asma Allah: Allahhu Akbar Allahhu Akbar ..., begitu pula pulangannya. Massa sebagai pendukung pihak warga Desa Agom cenderung berperilaku beringas, anarkhis dan brutal dalam menghadapi situasi konflik. Dengan gaya manajemen konflik: *Pertama*, sebelum penyerangan warga Desa Agom mempersiapkan senjata-senjata. Warga selain Lampung yang turut berkonflik diberi kalung daun kelapa muda (janur) untuk menjaga keselamatan. *Kedua*, dari berbagai penjuru berkumpul di Lapangan Waringin Harjo Desa Agom. *Ketiga*, kendaraan massa berhenti di Pasar Patok Kecamatan Way Panji, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki melintasi Desa Sidoharjo dan Desa Sidoreno menuju Desa Balinuraga. Taktik konflik yang dilakukan atas anjuran dari Tokoh Adat dari Keratuan Darah Putih yang dipimpin oleh Raden Imba dan Lima Marga Lampung Selatan, bahwa penyerangan

dilakukan pada pukul 14.00 hingga 16.30 WIB dimana selesai tidak selesai seluruhnya harus meninggalkan Desa Balinuraga.

Gambar 2. Urut Urutan Kejadian Konflik di Kabupaten Lampung Selatan

Kejadian-kejadian penanganan oleh Pemerintah/Daerah Lampung Selatan

-Gubernur & Bupati Lamsel - Aparat Pemerintah (Daerah Lampung Selatan) memfasilitasi dan me-arbitrase
-Upaya perdamaian dilakukan Raja Bali bertemu dgn sejumlah Tokoh Adat Lampung.
-Deklarasi Perdamaian

2012 Konflik Balinuraga

2012
Keonaran depan
masjid Desa
Sidoharjo

-Ada 3 point permohonan maaf warga Bali Napal.
-Ditindaklanjuti dgn 6 point perjanjian perdamaian.

2012 Konflik Napal

Jajaran Pemerintah Daerah & Muspida Lampung Selatan memediasi penyelesaian konflik antar warga.

2011 Konflik Marga Catur

2010
Konflik Ds Tetaan

2010
Penyerang Ds
Pasemah

2009
Perusakan Msjd
Ds.Ruguk

2009
Konflik Ds.Palas
Pasemah

2005
Konflik Ds.
Pasemah

1982
Konflik Ds.
Sandaran

Kejadian-kejadian menurut Pandangan Pihak-Pihak Yang Berkonflik

-Serangan puncak dikomandoi ketua tokoh adat dari Keratuan Darah Putih.
-Serangan ditentukan sekitar dua jam, balik.
-Pengerahan massa dari sms sekitar 20.000 orang
-Pihak-pihak yang berkonflik diselesaikan melalui dialog, negosiasi, mediasi dan arbitrase, melibatkan : tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polri dan TNI serta pemerintah.
-Pemuda-pemuda Balinuraga berbuat kerusuhan di depan masjid sedang takbiran karena bising.

-Penyerangan ke warga Ds. Kota Dalam oleh warga Bali
-Pengerahan massa 400 an warga Lampung untuk serangan balasan
-Terjadi dua kali serangan balasan thd warga Bali Napal
-Ada mediasi dan penanganan oleh pemerintah.

-Warga Bali kesal dgn warganya tewas.
-Tak ada respon dari pihak keluarga pelaku & pemerintah daerah.
-Pihak keamanan/ kepolisian kurang sigap amankan pelaku kasus penganiayaan.

-Berawal dari perkelahian pemuda Lampung dgn pemuda Bali dari Kecamatan Ketapang.
-Penyerang warga Desa Tetaan Kec. Penengahan oleh warga Bali

-Tidak terima kalah dalam bertikai anggota warga Bali, maka terjadi penyerang dan pembakaran rumah warga Ds Pasemah Kec Palas

Penyerangan dilakukan karena kesal dan terganggu suara adzan yang keras.
Masjid Desa Ruguk jadi sasaran amukan massa warga Bali. Akibatnya atap masjid rusak.

-Bermula dari pertikaian antar kelp. siswa Bali & Kelp. Siswa Semendo dimana Kelp Bali kalah.
-Lapor ke warga desa sedang Ritual Ngaben.
-Ramai-ramai mencari pelaku dan lakukan perusakan

-Penyerangan warga Ds. Bali Agung thd warga Ds. Palas Pasemah.
-Akibatnya beberapa rumah warga Ds. Palas Pasemah terbakar.

Perselisihan warga Bali Ds. Balinuraga dgn warga Lampung Ds. Sandaran memperebutkan kekuasaan calo agen perjalanan angkutan umum.

Tahap Akibat

Suatu krisis konflik pasti akan menimbulkan suatu akibat konflik. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain atau mungkin melakukan gencatan senjata (jika seperti perang terjadi). Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak berkonflik mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Apa pun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini mengarah menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian konflik.

Pada saat krisis dengan ribuan massa pendukung warga Desa Agom menyerang Desa Balinuraga, sehingga membuat kocar-kacir warganya, ada 6 orang yang tewas dan 419 Kepala Keluarga atau sekitar 1700 orang mengungsi. Akibat konflik tersebut di pihak Desa Balinuraga kurang lebih ada 375 rumah hancur akibat dirusak dan dibakar, dan sekitar 103 rumah rusak ringan. Secara keseluruhan, kerusakan dan korban yang dialami oleh warga Desa Balinuraga, menurut tokoh masyarakat setempat, bahwa ada sebuah gedung SMP rusak 40 %, sebuah gedung SD rusak 20 %, Pura tempat ibadah ada 1 buah rusak parah, rumah warga berjumlah 375 rusak dan fasilitas umum rusak dan puluhan orang Bali luka-luka, harta-benda yang rusak dan raib 11 motor, satu minibus, dan dua mobil jeep dengan total kerugian diperkirakan sampai Rp 23 milyar.

Adapun pihak-pihak yang terlibat konflik, yaitu: kedua belah pihak yang berkonflik, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap perangkat desa. Kemudian pihak-pihak lain yang terlibat konflik, antara lain: secara kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Kapolsek dan jajarannya; TNI, LSM, Ormas, Satpol PP, Bupati dan Aparat Pemerintah Daerah, serta lembaga-lembaga keamanan lainnya, terutama dalam proses pengendalian terhadap situasi dan kondisi, serta dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian. Untuk mengakhiri konflik juga telah diadakan beberapa kali pertemuan dan dialog antar tokoh (tokoh adat) dari wakil Lampung dan Bali, dimana kurang lebih ada lima kali pertemuan dengan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi pemerintah daerah. Disamping itu,

dilakukan proses pengawasan dan penghentian aksi kekerasan oleh militer yang berperanan sebagai penjaga perdamaian bersifat netral. Proses deeskalasi konflik pun diupayakan oleh pihak pemerintah dengan memberlakukan status darurat sipil. Proses deeskalasi konflik pun telah terlaksana karena sudah adanya kesadaran dari pihak-pihak yang berkonflik.

Selanjutnya, dilakukan suatu proses rekonsiliasi sikap dan strategi dari pihak-pihak yang berkonflik dengan melalui: negosiasi, mediasi, arbitrase terutama pada level elit pimpinan. Dengan negosiasi sebagai suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan konflik dengan mengedepankan para tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yang berkonflik, Kades Balinuraga dan Kades Agom. Penyelesaian konflik dengan cara me-Mediasi pun dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik menyepakati ditunjuk pihak ketiga sebagai mediator, yaitu masing-masing kepala desa nya oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kasubdit Koordinator Masyarakat Polda Lampung sebagai pengontrol. Penyelesaian konflik demi terwujudnya perdamaian dan deklarasi dilaksanakan di Balai Keraton Hotel Novotel Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 4 November 2012. Dalam acara tersebut dihadiri oleh para pejabat pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, para Tokoh Lampung dan para Tokoh Bali. Perjanjian perdamaian yang telah dideklarasikan, nampaknya belumlah dapat dinyatakan sebagai sebuah perjanjian perdamaian yang abadi, karena perjanjian yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan jenis perjanjian Arbitrase dengan strategi kalah-kalah (*lose-lose strategy*), yang semestinya menciptakan (*win & win solution*) sehingga terwujud terciptanya suatu keputusan kompromi dan kolaborasi.

Dalam perjanjian perdamaian arbitrase, pihak *arbitrator* mendengarkan pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrator bertindak seperti hakim dalam menentukan penyelesaian konflik. Dengan strategi tersebut, membuat pihak-pihak yang berkonflik merasa tidak puas dan kemungkinan timbulnya konflik kembali. Untuk sampai pada perjanjian damai yang sesuai harapan, maka sebaiknya pemerintah memperhatikan harapan dari kedua belah pihak yang berkonflik.

Penyelesaian konflik antara warga Bali Desa Balinuraga dengan warga Lampung Desa Agom tidak menggunakan seorang hakim, baik mediator maupun arbitrator ditunjuk dan diperankan oleh masing-masing kepala desa dari pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2012 dilaksanakan deklarasi perdamaian di Lapangan Waringin Harjo Desa Agom Kecamatan Kalianda yang dihadiri oleh para warga Lampung Desa Agom Kecamatan Kalianda dan para warga Bali Desa Balinuraga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Aparat keamanan dari TNI Polri. Penandatanganan maklumat damai dilakukan dihadapan Raja Bali dan Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung.

Tahap Pascakonflik

Pada tahap ini situasi terkendali dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan lebih mengarah ke normal di antara kedua pihak yang berkonflik. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, maka tahap pascakonflik sering kembali lagi menjadi situasi pra konflik.

Usai penandatanganan maklumat dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap maklumat tersebut, pihak-pihak yang berdamai melakukan beberapa cara, diantaranya mempertemukan para tokoh adat se-Lampung dengan para keluarga korban yang meninggal. Di samping itu, disebarkan maklumat tersebut ke seluruh kepala keluarga dan keluarga-keluarga korban yang mengungsi di SPN. Selanjutnya maklumat disosialisasikan ke seluruh desa-desa warga Bali di seluruh Lampung, dan diseluruh Indonesia.

Cara berikutnya, melalui budaya dan ritual, dimana pada acara-acara tersebut akan disinergiskan dengan pertemuan yang terus-menerus. Pertemuan bisa dilakukan dua bulanan atau tiga bulanan yang digagas oleh masyarakat Lampung dan Bali serta untuk masalah teknis tergantung pada pihak yang berdamai. Selanjutnya, Raja Bali dan tokoh-tokoh adat Lampung berkunjung di SPN memberikan bantuan sekaligus mendeklarasikan Forum Komunikasi Masyarakat Bali Lampung.

Berbeda halnya dengan penandatanganan maklumat damai, adalah kondisi dan situasi pasca konflik keberadaan pemerintahan Desa Balinuraga bergejolak. Menurut PJS Sekretaris Desa Balinuraga, bahwa “keadaan struktur pemerintahan Desa Balinuraga kacau. Kades dan Sekdes mengundurkan diri. BPD dan Kaur juga sedang kosong. Saya ditunjuk jadi PJS Sekdes karena dulunya Kepala Dusun. Kepengurusan ini sedang dibentuk dan pemerintahan langsung dikendalikan dari pihak kecamatan.”

Tindakan warga Bali Desa Balinuraga yang selalu membanggakan diri “akulah yang paling kuat”, terbalaskan. Mereka yang sebelumnya selalu beratribut pakaian adat dalam beraksi. Namun setelah konflik mereka tidak lagi demikian. Sifat tindakan membanggakan diri warga Balinuraga telah terbayarkan dengan rasa traumanya. Dengan demikian, tidak ada motif lain selain pelampiasan emosi balas dendam yang selama ini selalu berada dalam tekanan terhadap tindak-tanduk warga masyarakat Bali Desa Balinuraga.

Kesimpulan

Tahap prakonflik sebagai tahap awal dari Penahapan konflik, dipicu oleh adanya isu pelecehan seksual yang menimpa dua gadis warga Desa Agom. Pada saat dialog dan negoisasi tidak ada kesepakatan dan kesepahaman sehingga terjadi eskalasi konflik. Tahap konfrontasi, berdasarkan rentetan kejadian dengan indikasi eskalasi konflik ditandai beberapa indikator, diantaranya : peningkatan insiden-insiden konflik dengan kekerasan tergolong kecil maupun besar dan beberapa kali terjadi insiden konflik publik.

Tahap krisis sebagai tahap puncak konflik, dimana hari Senin 29 Oktober 2012 warga Lampung dan massa pendukungnya menyerang dan memporakporandakan Desa Balinuraga. Tahap Akibat, akibatnya kedua belah pihak yang berkonflik, para tokoh dan segenap perangkat desa terlibat dalam proses pengendalian terhadap warganya masing-masing, serta berupaya menyelesaikan konflik dan perdamaian. Upaya perdamaian juga dilakukan oleh Raja Bali bertemu dengan sejumlah tokoh adat Lampung dan Bali serta berdialog. Proses penghentian aksi kekerasan oleh intervensi militer. Proses rekonsiliasi dan strategi dari pihak-pihak yang berkonflik melalui: negosiasi, mediasi, arbitrase. Dalam proses mediasi dan arbitrase, baik mediator maupun arbitrator ditunjuk dan

diperankan oleh masing-masing oleh kepala desanya dari pihak-pihak yang berkonflik. Tahap Pascakonflik dan kesepakatan maklumat, dimana pelaksanaan sosialisasi maklumat perdamaian dilakukan. Kondisi dan situasi pasca konflik keberadaan pemerintahan Desa Balinuraga bergejolak dimana kepala desa dan sekretaris desa nya mengundurkan diri. BPD dan Kaur juga kosong.

Daftar Pustaka

- Asy'ari,Suaidi. (2003). *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. INIS. Jakarta
- Budiman, Budisantoso,dkk.(2012). *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*, AJI Bandar lampung. Diakses melalui<https://www.acrobat.com/en_us.html > tgl. 12 Juni 2014.
- Burhanudin, dkk.(ed.). (1998). *Sistim Siaga Dini Untuk Kerusuhan Sosial*, Jakarta: Litbang Depag dan PPIM
- Creswell,John W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fisher, Simon. (2010). *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak* (edisi bahasa Indonesia), The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Galtung, Johan. (1975). *“Three approaches to peace: peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding”*. Dalam Johan Galtung (ed.). *Peace, War, and Defense – Essays in Peace Research* Copenhagen: Christian Ejlors
- Galtung, Johan. (2003). *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, Pustaka Eureka, Surabaya
- Kriesberg, Louis. (1973).*The Sociology of Social Conflicts*. Englewood Cliffs, New Jersey Prentice-Hall, Inc.
- Ritzer, Geoge & Goodman, Douglas J. (2004). *Teori Sosiologi Modern* ,Bantul: Kreasi Wacana
- Rohidi,Tjetjep Rohendi (penerjemah). (1992). *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode-metode baru / Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman*. Jakarta : UI-Press.
- Sihbudi, dkk. (2001).*Bara Dalam Sekam*. Bandung: Mizan Media Utama

- Susan, Novri. (2010). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Tadjoeddin. (2002). *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia, 1990-2001*. Working Paper : 02/01-I, Project INS/99/002-UNSFIR/United Nations Support Facility for Indonesian Recovery, Jakarta, April 2002. Diakses melalui <https://www.acrobat.com/en_us.html> tgl. 5 Mei 2012.
- Wijardjo,dkk. (2001). *Konflik, Bahaya atau Peluang? Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Wirawan. (2010). *Konflik Dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Zeitlin, Irving M.(1998). *Memahami Kembali Sosiologi*,Yogyakarta: UGM Press.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2 012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Diakses melalui < https://www.acrobat.com/en_us.html> tgl. 11 Januari 2013.

Jurnal dan lain-lain

- Fanani,Yazid, Penanggulangan konflik tawuran warga Matraman, Tesis, Pascasarjana UI, 2001. Diakses melalui <<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>> tgl. 12 Januari 2015
- Hasil Survey dari LSI 2012. Diakses melalui < <http://news.liputan6.com/read/473537/lsi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia>> tgl. 21 Maret 2013.
- Hendrajaya, dkk., Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya, Laporan Akhir, Badan Pembangunan dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, 2010. Diakses melalui <<http://km.ristek.go.id/assets/files/RAGAM%20KONFLIK%20DI%20INDONESIA.pdf>https://www.acrobat.com/en_us.html> tgl. 22 Mei 2013.
- Hermansyah, Aswandi dan Herlina, “Konflik dan Kekerasan Etnis Dalam Masyarakat Multikultural (Analisis Budaya Terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Negara)”, *Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura* Vol IX, No 1 Januari 2008. Diakses melalui https://www.acrobat.com/en_us.html tgl. 4 Mei 2012.

- Jenis Bencana dan Kerusakan Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Diakses melalui <<http://bpbd.pinrangkab.go.id/index.php/2012-05-03-03-56-06/jenis-bencana/kerusakan-sosial>> tgl. 21 Mei 2013.
- Konflik Sosial-Bentrok Antarwarga, Puluhan Rumah Dibakar. Diakses melalui < <http://gedeyenuyani.blogspot.com/2012/02/bentrok-di-sidomulyo-diduga-didalami.html>> tgl. 20 Mei 2013.
- Lampung Post, Grafis, Lampung Post, Rabu 25 Januari 2012, No. 12330, Tahun XXXVII. Diakses melalui <<http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdm/artikelefhm>> tgl. 20 November 2012.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue, *Pengelolaan Konflik di Indonesia Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Juni 2011. Diakses melalui <https://www.acrobat.com/en_us.html> tgl 26 Januari 2013.
- Nulhaqim, Soni Ahmad, Manajemen Kolaborasi Resolusi Konflik Dalam Perkelahian Antar Warga Di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Palmeriam dan Berland di Jakarta Timur), 2007. Diakses melalui <<http://soninulhaqim.blogspot.com/2007/12/manajemen-kolaborasi-resolusi.html>> tgl. 12 September 2013.
- Nuraeni, dan Faturachman, Faktor Prasangka Sosial Dan Identitas Sosial Dalam Perilaku Agresi Pada Konflik Warga (Kasus Konflik Warga Bearland dan Warga Palmeriam Matraman Jakarta Timur), *Jurnal Sosiosains* 2006, XIX(1). Diakses melalui <https://www.acrobat.com/en_us.html> tgl. 13 Juni 2012.
- Penelitian tentang “Membali di Lampung” Studi Kasus Identitas Kebalian di Desa Balinuraga Lampung Selatan, Library UKSW, 2011. Diakses melalui <<http://www.lib.uksw.ac.id>> tgl. 27 Mei 2013.
- Umar, Musni dan Erman Anom, “TAWURAN” di Johar Baru Jakarta Pusat, Juli-Agustus 2011, Laporan Penelitian. Diakses melalui <<http://musniumar.wordpress.com/2011/10/08/laporan-hasil-penelitian-tawuran-di-johar-baru/>> tgl. 13 Juni 2012.

Yara, Idawati H.M., Konflik komunal di Jakarta : Studi kasus di kawasan Matraman, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Tesis, Pascasarjana UI, 2002. Diakses melalui <<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>> tgl. 12 Januari 2015